Lampiran Surat
Nomor:
Tanggal:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016–2019

INSTANSI PENANGGUNGJAWAB: KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
A. BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM										
A.1 PERUNDINGAN DAN PENYELESAIAN BATAS MARITIM										
1.	**Percepatan Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga**	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Penetapan Undang-Undang (UU) Ratifikasi Perjanjian Perbatasan Maritim Republik Indonesia (RI)	RI dan Singapura (segmen timur laut teritorial)	v	v	Kemenhan, Kemenhub, Kemenkum-HAM, Kemen-setneg, TNI, Polri, BIG, BNPP			
				RI dan Filipina (Zona Ekonomi Eksklusif/ ZEE)	v	v	KKP, Kemensetneg, Kemen-kumham, BIG			
			Perundingan perbatasan maritim RI	RI dan Filipina (Landas Kontinen/LK) Kesepakatan *timeframe* perundingan dan penetapan	-	v	Kemen-ESDM, TNI, Polri, BIG			

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
				garis batas awal						
				RI dan Vietnam (ZEE) Kesepakatan kelanjutan perundingan *common understanding* posisi dasar masing-masing	-	v	KKP, TNI, Polri, BIG			
				RI dan India (ZEE) Kesepakatan *timeframe* perundingan dan penetapan garis batas awal	-	v	KKP, TNI, BIG			
				RI dan Palau (ZEE) Melanjutkan perundingan	v	v	KKP, TNI, BIG			
				RI dan Timor Leste (Laut Teritorial) Dimulainya proses perundingan	-	v	Kemenhan, Kemenhub, TNI, Polri, BIG			
		Pemetaan batas wilayah	Terselenggara-nya pemetaan batas wilayah dalam mendukung diplomasi	4 dokumen teknis perundingan batas maritim antarnegara yang mutakhir	1	1	Kemenko Maritim, KKP, Kemenhan, Kemenhub, Kemen-			

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
			batas maritim antarnegara				ESDM, BIG, TNI, Polri			
2.	**Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen sesuai dengan Hukum Internasional**	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Penyiapan dokumen submisi	Penyelesai-an dokumen submisi	v	v	Kemen-ESDM, TNI, BIG			
			Penyampaian submisi ke PBB	Submisi diterima PBB	-	-	Kemen-ESDM, TNI, BIG			
A.2 PENGUATAN DIPLOMASI MARITIM										
1.	**Peningkatan Kepemimpin-an di dalam Berbagai Kerja Sama Bidang Kelautan pada Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral**	Pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif dengan berdasarkan politik luar negeri bebas aktif	Penyusunan buku putih diplomasi maritim	Terciptanya pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif atas dasar politik luar negeri bebas aktif oleh semua pemangku kebijakan terkait	-	1	Kemenhan, KKP, TNI, Polri, Bakamla			
		Optimalisasi diplomasi ter-kait dengan hukum dan perjanjian	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	*State Parties on the Law of the Sea (SPLOS)*	Delegasi	Delegasi	Kemenko Maritim			
				International Seabed Authority (ISA)	v	v	Kemen-ESDM, KKP, TNI, LIPI, BIG			

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
				Indian Ocean Rim Association (IORA)	Ketua	Ketua	Kemenko Maritim, KKP, Polri			
				ASEAN Maritime Forum	v	v	Kemenhub, KKP, TNI, Polri			
				Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)	v	v	Kemenko Perekonomi-an, KKP, Kemendag, Kemendagri, Kemenhub			
2.	**Peningkatan Peran Aktif dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia di Bidang Kelautan**	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Terjaganya kepentingan Indonesia dan penegasan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan	Isu Kawasan Laut China Selatan	v	v	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenhan, KKP, Kemenhub, TNI, Polri, BIG			
			Peran dan partisipasi aktif Indonesia	*ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Maritime Security*	v	v	Kemenko Maritim, Kemenhan, Kemenkeu, TNI, Polri			

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
3.	**Kepemimpin-an atau Peran Aktif dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan**	Optimalisasi diplomasi ter-kait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	Pembentukan instrumen internasional *Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction*	v	v	Kemen-ESDM, Kemen-LHK, KKP, LIPI			
4.	**Peningkatan Penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan**	Pencalonan WNI di organisasi internasional kemaritiman	Pencalonan Hakim Mahka-mah Interna-sional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea* - ITLOS)	Terpilihnya WNI sebagai Hakim ITLOS	v	v	Kemenko Maritim, Kemenhub, KKP,Kemen-setneg, Setkab, BMKG, BIG			
D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT										
D.1 PERTAHANAN LAUT; D.2 KEAMANAN LAUT; D.3 PERIKANAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (*IUU FISHING*)										
4	**Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Kerja Sama Perta-hanan dan Keamanan Laut Baik di Tingkat Regional**	Pencapaian kepentingan nasional da-lam bidang pertahanan di forum internasional	Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat	Kegiatan kerja sama perta-hanan yang mengacu pada politik bebas aktif dan jati diri sebagai bangsa mari-tim di forum internasional	-	1 kegiatan	Kemenhan (PJ 1) TNI			

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU		INSTANSI TERKAIT	CAPAIAN		KENDALA
					2016	2017		2016	TW I 2017	
	maupun Inter-nasional		Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	Kegiatan diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	20% -	20% 1 kegiatan				

KETERANGAN:

1. Penulisan program kegiatan sudah disesuaikan dengan format Rencana Aksi yang ada dalam Lampiran Perpres Nomor 16 Tahun 2017;
2. Kementerian/Lembaga agar melengkapi data dalam kolom capaian dan kendala;
3. Kementerian/Lembaga agar menyampaikan dokumen dimaksud beserta nomor kontak Pejabat/Pegawai yang bertanggungjawab atas pengisian dokumen ini kepada Sdr. Arin Maulana di nomor selular 085723120969 atau email: asdepsatu.d1maritim@gmail.com, paling lambat 12 Juli 2017.